

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora  
Skripsi, July 2025  
Drajad Candra Putra  
114211007

## **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG**

### **ABSTRAK**

Distribusi bahan bakar subsidi di Indonesia kerap menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran dan pengawasan distribusi. Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode aplikasi MyPertamina sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penerapan sistem barcode MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, serta regulasi teknis dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan barcode MyPertamina memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat yang terbatas, serta potensi diskriminasi akses bagi kelompok tertentu.

**Kata kunci:** *BBM subsidi, MyPertamina, barcode, analisis yuridis, distribusi energi*

Ngudi Waluyo University  
S1 Law Study Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities  
Thesis, July 2025  
Drajad Candra Putra  
114211007

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MY  
PERTAMINA BARCODE IN THE PURCHASE OF SUBSIDIZED FUEL  
IN SEMARANG REGENCY**

**ABSTRACT**

The distribution of subsidized fuel in Indonesia often faces various challenges, especially in terms of targeting accuracy and distribution supervision. The government through PT Pertamina (Persero) has implemented a digitalization system for purchasing subsidized fuel using the My Pertamina application barcode as an effort to increase efficiency and accountability. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of the My Pertamina barcode system in purchasing subsidized fuel, especially in the Semarang Regency area. The method used is a normative legal approach with a study of literature and related laws and regulations, such as Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution, and Retail Selling Prices of Fuel, and technical regulations from the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). The results of the study indicate that although the implementation of the My Pertamina barcode has a strong legal basis, its implementation still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited technological literacy of the community, and potential discrimination in access for certain groups.

Keywords: *subsidized fuel, My Pertamina, barcode, legal analysis, energy distribution*